

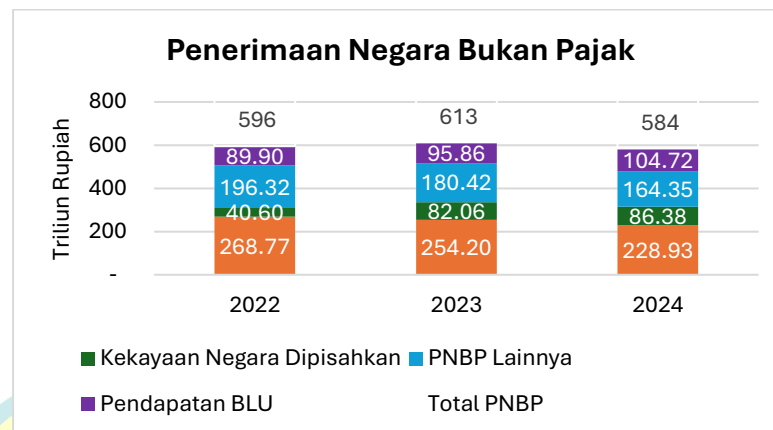
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi negara tidak terlepas dari peran sektor-sektor strategis yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara serta kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki negara dengan optimal agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya tersebut memiliki posisi penting, sekaligus menghadapi tuntutan yang tinggi dalam hal akuntabilitas, tata kelola, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Salah satu sumber daya yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya alam. Sektor sumber daya alam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang salah satunya berasal dari sektor sumber daya alam. Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2018, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang berasal dari pungutan kepada orang pribadi atau badan atas pemanfaatan sumber daya, layanan, atau hak yang disediakan oleh negara. Melalui peningkatan penerimaan negara tersebut, sektor sumber daya alam juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui kontribusi ekspor hasil pertambangan (Hidayah & Raihan, 2024).



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 2022-2024

Sumber: Kementerian Keuangan (2026)

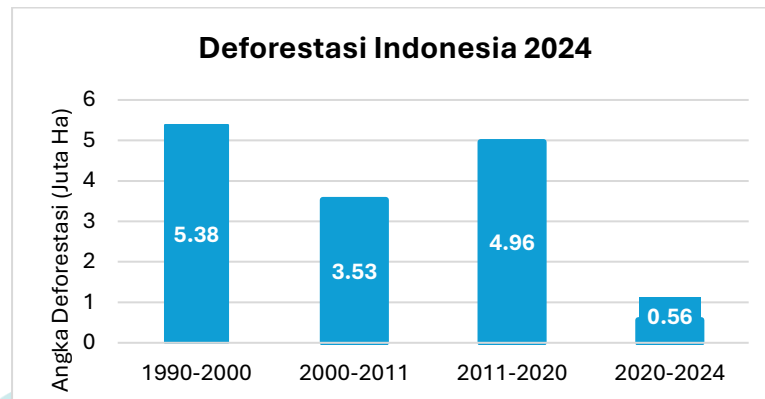
Gambar 1.1 menunjukkan nilai penerimaan negara bukan pajak pada periode tahun 2022 hingga 2024. Selama periode tersebut negara memperoleh penerimaan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2022 dengan penerimaan sejumlah Rp 596 triliun, tahun 2023 dengan penerimaan Rp 613 triliun, dan tahun 2024 dengan penerimaan Rp 584 triliun. Sektor sumber daya alam memberikan kontribusi terbesar tiap tahunnya, di mana pada tahun 2022, sektor ini memperoleh penerimaan sejumlah Rp 269 triliun, kemudian tahun 2023 Rp 254 triliun, dan tahun 2024 Rp 229 triliun dengan total selama periode tersebut sebesar Rp 752 triliun.

Nilai tersebut cukup signifikan bila dibandingkan dengan sektor penerimaan lainnya seperti Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP lainnya, hingga pendapatan BLU. Adapun sektor Kekayaan Negara Dipisahkan yang memperoleh penerimaan sejumlah Rp 41 triliun pada tahun 2022, kemudian Rp 82 triliun pada tahun 2023, dan Rp 86 triliun pada tahun 2024. Lalu pada sektor PNBP lainnya diperoleh sejumlah Rp 196 triliun pada tahun 2022, kemudian Rp 180 triliun pada tahun 2023, dan Rp 164 triliun pada tahun 2024.

Dan yang terakhir adalah pendapatan sektor BLU yang memperoleh pendapatan sejumlah Rp 90 triliun pada tahun 2022, kemudian Rp 96 triliun pada tahun 2023, dan Rp 105 triliun pada tahun 2024.

Selain memberikan dampak positif berupa kontribusi terhadap penerimaan negara, aktivitas operasional pada perusahaan sektor sumber daya alam juga dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan. Salah satunya adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan batubara, di mana penelitian oleh Prasetyo *et al.* (2025) menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan batubara menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan seperti erosi tanah, pendangkalan sungai, pencemaran air, hingga pencemaran udara. Selain itu, Prasetyo *et al.* (2025) juga mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan batubara menimbulkan dampak sosial seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat lingkungan yang tercemar, sehingga masyarakat harus menanggung beban sosial-ekonomi seperti biaya kesehatan yang semakin meningkat serta kehilangan mata pencaharian.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah deforestasi atau penggundulan hutan yang diakibatkan oleh adanya perluasan lokasi pertambangan serta pembangunan permukiman di sekitarnya (Giljum *et al.*, 2022). Aktivitas pertambangan memperburuk sektor pertanian, hilangnya lahan produktif akibat ekspansi pertambangan memaksa petani untuk mencari lahan alternatif guna mempertahankan tingkat produksi pangan mereka yang menyebabkan terjadinya pergeseran aktivitas pertanian ke kawasan hutan yang berpotensi menyebabkan deforestasi (Mishra *et al.*, 2022).



Gambar 1.2 Deforestasi Indonesia 2024

Sumber: Kementerian Kehutanan (2025)

Gambar 1.2 menunjukkan data tingkat deforestasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir, di mana berdasarkan data tersebut selama dua dekade terakhir Indonesia telah kehilangan lebih dari 9 juta hektar hutan. Selain itu, berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan (2025) laju deforestasi neto pada tahun 2024 tercatat mencapai 175,4 ribu hektar, disertai dengan kondisi lebih dari 60% sungai besar di Indonesia yang berada pada kategori tercemar sedang hingga berat akibat limbah industri dan aktivitas ekonomi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan belum optimalnya pengelolaan risiko lingkungan oleh perusahaan yang berkontribusi terhadap meningkatnya degradasi lingkungan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial yang timbul sebagai konsekuensi dari kegiatan operasionalnya. Ketiga aspek tersebut dikenal

dengan istilah *Triple Bottom Line*, yang secara bersamaan harus diperhatikan oleh perusahaan dan diungkapkan melalui *sustainability report* (Novatiani *et al.*, 2024). *Sustainability report* merupakan praktik pelaporan pada organisasi untuk menginformasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan agar organisasi dapat memastikan transparansi tentang bagaimana organisasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (GRI, 2022). *Sustainability report* membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, mengevaluasi capaian kinerja, serta mengelola proses perubahan guna mewujudkan transformasi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan (Tusiyati, 2019).

Dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan keberlanjutan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini mengatur bahwa lembaga jasa keuangan, perusahaan tercatat, dan perusahaan publik wajib untuk mengungkapkan *sustainability report* yang mana di dalamnya membahas mengenai harmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan (OJK, 2017). Dengan adanya regulasi ini, *sustainability report* resmi menjadi sebuah kewajiban, bukan hanya sukarela seperti sebelumnya, sehingga perusahaan-perusahaan publik diharapkan untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengungkapkan dampak keberlanjutan yang signifikan.



Gambar 1.3 Indeks ESG Sektor Pertambangan 2024

Sumber: Katadata (2024)

Gambar 1.3 menunjukkan indeks *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang dipublikasikan oleh Katadata pada tahun 2024, di mana data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia masih belum mencapai angka yang signifikan. Beberapa perusahaan besar seperti PT Mitrabara Adiperdana Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk mencatat skor relatif tinggi, yang mengindikasikan komitmen yang lebih kuat dalam mengungkapkan aspek keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Namun, sebagian besar perusahaan berada pada rentang skor menengah, mengindikasikan bahwa pengungkapan *sustainability report* masih dilakukan sebatas memenuhi persyaratan regulasi dan belum menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan.

Variasi skor ini mengindikasikan bahwa setiap perusahaan memiliki tingkat komitmen dan kapasitas keberlanjutan yang berbeda-beda. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas pengungkapan *sustainability report* tidak semata-mata dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi atau tekanan

eksternal, tetapi juga ditentukan oleh kondisi dan karakteristik internal perusahaan yang mendukung praktik pelaporan keberlanjutan. Dengan kata lain, perbedaan skor keberlanjutan ini membuka ruang untuk melihat lebih jauh faktor-faktor apa saja yang sebenarnya berkontribusi dalam mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi keberlanjutan yang lebih komprehensif dan berkualitas.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong atau memengaruhi luasnya pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal perusahaan seperti karakteristik perusahaan, kinerja perusahaan, hingga struktur perusahaan. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari para pemangku kepentingan, regulasi pemerintah, serta reputasi perusahaan di mata publik juga memegang peranan penting. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada beberapa faktor yang diduga memengaruhi pengungkapan *sustainability report* serta masih menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji, yaitu mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan melalui komisaris independen dan komite audit, kinerja keuangan yang diproksikan melalui profitabilitas, serta karakteristik perusahaan yang diproksikan melalui umur perusahaan.

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pengelolaan perusahaan secara efektif

Tata kelola perusahaan merupakan suatu rangkaian yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan pimpinan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Wardoyo *et al.*, 2022). Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Di mana perusahaan dapat dianggap memiliki tata kelola yang baik apabila perusahaan tersebut taat terhadap peraturan dan prinsip yang berlaku (Setiowati *et al.*, 2024).

Salah satu elemen mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam fungsi pengawasan adalah keberadaan komisaris independen. Menurut OJK (2016) komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang secara resmi tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk hubungan finansial, kepengurusan, kepemilikan saham, ataupun hubungan keluarga baik itu dengan anggota direksi, anggota komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin baik, sehingga mendorong peningkatan pengungkapan informasi, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan (Rachmadanty & Agustina, 2023).

Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh antara komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan *sustainability* report, namun hasilnya menunjukkan adanya kontradiksi. Penelitian dilakukan oleh Listiani & Fadjar (2025) yang menguji pengaruh keberadaan komisaris independen

terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ramantha (2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*, semakin besar proporsi komisaris independen diindikasikan dapat meningkatkan tuntutan mengenai *sustainability report*.

Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Murtanto (2025) dan Rachmadanty & Agustina (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah komisaris independen belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, kurangnya kompetensi dan independensi dari komisaris independen, dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran komisaris independen terhadap keberlanjutan. Hasil lain juga ditemui melalui penelitian Ulfa *et al.* (2025), yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Ini berkaitan dengan tekanan dari para pemegang saham yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek perusahaan, sehingga menuntut perusahaan untuk membatasi pengungkapan informasi dalam *sustainability report*.

Mekanisme tata kelola perusahaan lainnya adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris (OJK, 2015). Melalui pengawasan yang ketat oleh komite audit, perusahaan lebih mampu untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, salah satunya adalah transparansi di mana perusahaan harus terbuka dalam mengungkapkan informasi terkait kegiatan operasionalnya, sehingga dapat mendorong pengawasan yang baik (Lusiana & Sari, 2023). Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh proporsi komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* dan hasil menunjukkan adanya kontradiksi hasil yang ditemukan.

Penelitian oleh Iqbal *et al.* (2023) dan Rohim *et al.* (2024) menyatakan bahwa kehadiran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan. Komite audit mampu mendorong manajemen melalui diskusi untuk mempraktikkan pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chiputra *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa komite audit yang terdiri atas anggota yang berkualitas dan memiliki wawasan terkait isu-isu keberlanjutan lebih efektif dalam memperkuat pengungkapan *sustainability report*.

Hasil penelitian berbeda dinyatakan dalam penelitian Hikmah & Anisykurlillah (2023) dan Immanuel & Sambuaga (2024) di mana ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan *sustainability*

report. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa rapat yang dilakukan oleh komite audit dinilai hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi kewajiban terhadap regulasi pemerintah, tanpa memperhatikan efektivitas perusahaan. Selain itu, komite audit juga dianggap belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas dan pengendali dalam manajemen perusahaan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah kinerja keuangan, yang dapat tercermin melalui profitabilitas perusahaan. Menurut Sari & Wahidahwati (2022) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dari aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan selama satu periode. Ahmadiriski *et al.* (2024) dalam penelitiannya menguji variabel profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur, menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin besar profitabilitas yang diperoleh suatu perusahaan maka informasi yang diungkapkan di dalam *sustainability report* akan semakin lengkap.

Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan melalui penelitian Mandagie *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur melalui rasio *Return on Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, di mana perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak selalu lebih banyak dalam melakukan aktivitas sosial dikarenakan laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih diprioritaskan untuk kepentingan operasional. Kemudian hasil lain juga ditunjukkan melalui penelitian yang

dilakukan oleh Tjandrapurnama & Oktaviani (2023) dan Hikmah & Anisykurlillah (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung tidak akan melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi keuangan perusahaan, sebab informasi yang disampaikan melalui *sustainability report* merupakan informasi yang cenderung sensitif untuk diungkapkan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* yaitu umur perusahaan, perusahaan dengan usia yang tua dan berpengalaman cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak mengenai keberlanjutan perusahaan karena pengalaman mereka dalam membuat laporan (Shofiyah, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Prihandono & Herliansyah (2025) dan Fadilah *et al.* (2022) menyatakan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang lebih tua memiliki pengalaman dalam membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan sehingga lebih menyadari akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang tercermin melalui *sustainability report*.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hanna *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk membangun citra baik perusahaan melalui aktivitas sosial yang diungkapkan melalui *sustainability report*. Namun hasil lain ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhania &

Nurdiana (2024) dan Amatullah *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa lamanya suatu perusahaan berdiri tidak mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan keberlanjutan. Meskipun perusahaan memiliki wawasan pemangku kepentingan yang komprehensif serta sistem akuntansi yang memadai, perusahaan yang lebih tua mungkin dapat beradaptasi lebih lambat terhadap tuntutan pelaporan keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan, peneliti menemukan adanya *research gap* berupa hasil yang berkontradiksi pada penelitian terdahulu yang menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan umur perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu telah berhasil melakukan pengujian terhadap masing-masing pengaruh mekanisme *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan yang berkontradiksi, sehingga hal tersebut menjadi *gap* penelitian yang menjadi salah satu tujuan adanya penelitian ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang menjadi

tujuan penelitian ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*?
4. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi dan pelaporan keberlanjutan dengan memperkaya kajian mengenai penerapan teori *stakeholder* dalam menjelaskan determinan pengungkapan *sustainability report*
2. Menyediakan bukti empiris mengenai hubungan antara mekanisme *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan umur perusahaan dengan pengungkapan *sustainability report*, sehingga dapat memperkaya literatur pada bidang tersebut.
3. Menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *sustainability report*, khususnya pada perusahaan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu untuk mendorong perusahaan untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan sosial perusahaan terhadap masyarakat.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu investor dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, sehingga dapat membantu investor dalam melakukan investasi pada perusahaan.

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas serta tingkat pengungkapan *sustainability report* perusahaan.



Intelligentia - Dignitas